

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 DI MASA *COVID-19***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Memenuhi Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**Pandu Nariyah
07011281722060**

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 DI MASA *COVID-19***

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**PANDU NARIYAH
07011281722060**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001



Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 DI MASA COVID-19

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 18 November 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Lili Erima, M.Si
Ketua



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
Anggota



Drs. Gatot Budiarto, MS
Anggota



Sofyan Effendi, S. IP., M.Si
Anggota



Inderalaya, November 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jadikanlah Sabar dan Shalat Sebagai Penolongmu, Sesungguhnya Allah Beserta Orang-Orang yang Sabar”

(Qs. Al-Baqarah: 153)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orangtua Saya, Bapak Herry dan Ibu Sri Herlina.**
- 2. Saudariku, Steffinna Precelia, Steffinni Precelia dan Selly Noverina.**
- 3. Seluruh Dosen dan Pegawai Fisip Unsri**
- 4. Rekan Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017**
- 5. Almamater Kebanggaan Saya.**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban dalam melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sehubungan dengan hal itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, kesabaran, dan kekuatan dalam setiap langkah untuk menyelesaikan skripsi ini. Keluarga saya Bapak Herry dan Ibu Sri Herlina serta saudari saya Steffinna Precelia, Steffinni Precelia dan Selly Noverina yang selalu mendoakan, mendukung secara moril maupun materil dan selalu memberikan semangat selama proses perkuliahan penulis.

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Ibu Dr Lili Erina, M.Si Selaku Pembimbing I yang selalu sabar dalam membimbing, memberikan ilmu, solusi terbaik, serta kritik dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang selalu sabar dalam membimbing, memberikan ilmu, solusi terbaik, serta kritik dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si (Alm) selaku Pembimbing I yang selalu sabar dalam membimbing, memberikan ilmu, solusi terbaik sampai dengan seminar proposal, semoga ilmu yang bapak berikan dalam penulisan skripsi ini dapat menjadi amal jariah yang tidak akan putus sampai kapanpun.
8. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan arahan, motivasi dan pengalaman selama proses perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
10. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Terkhusus Mbak Ita Permata Sari yang telah membantu dalam mengurus administrasi.
11. Bapak Kurniawan, AP., M.Si selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
12. Bapak Yasir Arasi, S.T., M.Si dan Ibu Dedek Diana Sita, AP., M.Si yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
14. Kakak tingkat saya Septa Nadia Putri dan Aji Pangestu yang telah memberikan dukungan dan senantiasa berbagi pengalaman, motivasi selama proses perkuliahan.

15. Sahabat saya Bagus Pangestu, M. Irfandi Setiawan, Naufal Satria Nugraha, dan Dheannita Cikanaya yang selalu mendoakan, berbagi pengalaman serta mengajarkan banyak hal selama proses perkuliahan.
16. Rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2017 Kampus Indralaya
17. Orang-Orang yang telah berbuat baik dan senantiasa menolong saya baik secara moril maupun materil.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Maka untuk membangun wawasan penulis dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membaca.

Palembang, November 2021

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 di Masa *Covid-19*. Permasalahan yang ada dilatar belakangi oleh terjadinya efisiensi dan perubahan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Penelitian ini dianalisis menggunakan pengukuran kinerja anggaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/ PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi *observasi*, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dikategorikan pada nilai kinerja anggaran baik. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan anggaran yang terjadi tidak berdampak besar pada kinerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Upaya yang harus dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yaitu: mempertahankan kinerja anggaran, meningkatkan kinerja anggaran pada setiap program, dan kegiatan dapat dijalankan secara maksimal.

Kata Kunci : Anggaran, Kinerja, Belanja, Covid-19, Program, Badan, Kesatuan, Bangsa, Politik, Provinsi, Sumatera, Selatan

Pembimbing I



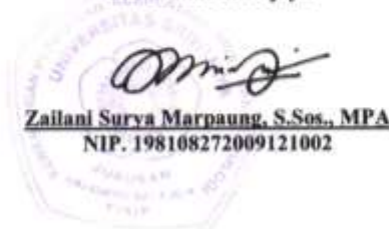
Dr. Lili Erina, M.S
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Palembang, November 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research aims to discover the National and Political Unity Agency of South Sumatera Budget Performance year 2020 in the time of COVID-19. The background problems that exist are happening on the efficiency and budget adjustments on National and Political Unity Agency of South Sumatera year 2020. This study was analyzed using budget performance measurements according to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 214/PMK.02/2017 concerning Measurement and Evaluation of Budget Performance on the Implementation of Work Plans and Budgets of State Ministries/Institutions. A quantitative with descriptive approach is the method used in this research. Data obtaining techniques used include observation and documentation. Research results show that the National and Political Unity Agency of South Sumatera budget performance are good. Based on the results above, it can be concluded that the budget changes that occurred did not have a major impact on budget performance at the National Unity and Political Agency of South Sumatra Province in 2020. Efforts that must be made by the National Unity and Political Agency of South Sumatra Province are: maintaining budget performance, improving budget performance in each program and activity can be run optimally.

Keywords: Budget, Performance, Spending, Covid-19, Program, Agency, Unity, Politic, Province, South, Sumatera

Advisor I



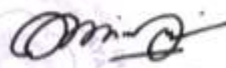
Dr. Lili Erina, M.S
NIP. 196612301992032001

Advisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Palembang, November 2021
Department Chief of The Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University


Zailani Surva Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Anggaran	7
2. Kinerja Anggaran	10
3. <i>Coronavirus Disease (Covid-19)</i>	18
B. Penelitian Terdahulu.....	20
C. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Desain Penelitian	26
B. Definisi Konsep	27
C. Definisi Operasional	28
D. Unit Analisis Data	28
E. Data dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31
H. Sistematika Penulisan	35
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah Singkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	37
2. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	38

3. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	38
4. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	39
5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	40
B. Analisis dan Pembahasan Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.....	53
1. Pengukuran Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	54
a. Capaian Keluaran	54
1) Pengukuran Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program	54
2) Pengukuran Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	57
b. Penyerapan Anggaran.....	63
c. Efisiensi	64
d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Pelaksanaan.....	69
2. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.....	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perubahan Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	5
2. Penelitian Terdahulu	20
3. Definisi Operasional	27
4. Pengukuran capaian keluaran (<i>output</i>) Program.....	55
5. Pengukuran capaian keluaran (<i>output</i>) Kegiatan	58
6. Data Efisiensi	65
7. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Pelaksanaan.....	70
8. Hasil Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Pelaksanaan	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	25
2. Lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	37
3. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
2. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian
4. Lembar Revisi Seminar Proposal
5. Kartu Bimbingan Skripsi
6. Lembar Revisi Skripsi
7. Laporan Realisasi Anggaran
8. Surat Penyedia Dana Anggaran
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPDR	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
CKP	: Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program
CKK	: Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
FORKOPIBDA	: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
FPK	: Forum Pembauran Kebangsaan
KESBANGPOL	: Kesatuan Bangsa dan Politik
LKJIP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
ORMAS	: Organisasi Kemasyarakatan
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPWK	: Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
PROV	: Provinsi
RENSTRA	: Rencana Strategis
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RVK	: Realisasi Volume Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SEKDA	: Sekretaris Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SUMSEL	: Sumatera Selatan
TVK	: Target Volume Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah mempunyai hak untuk melakukan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan secara luas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Sebagai konsekuensi, maka pemerintah daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana yang ada agar dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Untuk menilai apakah pemerintah daerah telah melakukan tugasnya dengan baik, maka pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu upayah penting untuk menilai tujuan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif agar dapat mencapai tujuannya.

Pengukuran kinerja menjadi hal penting bagi organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja dibutuhkan untuk menilai pertanggungjawaban organisasi dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan efektif. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/ PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian atau lembaga dalam dokumen anggaran.

Kata “anggaran” yang diikuti “kinerja” secara etimologi bahasa mengandung pengertian bahwa penganggaran kinerja selalu mengaitkan alokasi anggaran dengan pencapaian kinerja pada setiap elemen alokasi dana yang dianggarkan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kinerja anggaran sering kali berkonsep pada anggaran berbasis kinerja yang merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan/sub kegiatan. Oleh sebab itu anggaran berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas kinerja yang menunjukkan pertanggungjawaban lembaga atas keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

Pada dasarnya dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam penganggaran, adapun prinsip-prinsip dalam penganggaran menurut Halim (2019:172) yaitu, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan disusun dengan pendekatan kinerja. Dalam sistem anggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah diharuskan untuk mencantumkan indikator-indikator yang digunakan untuk meningkatkan kinerja sehingga apa yang diharapkan dari pelaksanaan anggaran ini dapat tercapai, adapun indikator yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan anggaran yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018:166) adalah indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Ketiga indikator yang dicantumkan harus dapat diukur hasilnya bukan pada seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan tetapi berdasarkan kinerja yang telah dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Penilaian kinerja tingkat satuan kerja dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran

setiap variabel aspek implementasi yang terdiri dari pengukuran evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dan penilaian evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat satuan kerja.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga pasal 39 Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/ Lembaga, eselon I/ program, dan satuan kerja/ kegiatan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori antara lain sebagai berikut:

1. Nilai kinerja anggaran lebih dari 90 persen (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan sangat baik, nilai kinerja anggaran lebih dari 80 persen (delapan puluh persen) sampai dengan 90 persen (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan baik.
2. Nilai kinerja anggaran lebih dari 60 persen enam puluh persen) sampai dengan 80 persen (delapan puluh persen) dikategorikan dengan cukup.
3. Nilai kinerja anggaran lebih dari 50 persen (lima puluh persen) sampai dengan 60 persen (enam puluh persen) dikategorikan dengan kurang, dan
4. Nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 persen (lima puluh persen) dikategorikan dengan sangat kurang.

Penilaian kinerja anggaran tak lepas dari yang namanya penilaian kinerja suatu organisasi publik yang memiliki berbagai program yang nantinya terbagi lagi menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi publik tersebut. Salah satu organisasi publik tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Disingkat menjadi KESBANGPOL PROV SUMSEL merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran dalam membantu Gubernur untuk penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (SEKDA). Dalam Perkembangannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera selatan juga mempunyai beberapa fungsi yaitu, Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Pelaksanaan fasilitasi organisasi politik dan organisasi sosial, Penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria bidang kesatuan bangsa dan politik, Pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya dan Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan kepegawaian dan keuangan.

Untuk menjalankan fungsi di atas, Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tentunya memerlukan anggaran setiap tahunnya. Tak terkecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020 dunia digemparkan dengan terjadinya *Covid-19* yang dengan cepat menyebar hanya dalam hitungan bulan, sehingga pemerintah melakukan efisiensi dan perubahan anggaran salah satu organisasi publik yang ikut terdampak dari perubahan tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Adapun rincian efisiensi dan perubahan anggaran belanja yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Perubahan Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sumsel

NO	Uraian Alokasi Anggaran	Jumlah (Rp)		Presentase Pengurangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Belanja Langsung	Rp. 5.637.010.550	Rp. 4.863.260.857,50	13,72%
2	Belanja Tidak Langsung	RP. 6.430.391.000	Rp. 6.430.391.000	0%
Total APBD tahun 2020		Rp. 12.067.401.550	Rp. 11.293.651.550,50	6,41%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perubahan yang terjadi pada anggaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD pada tahun 2020 terjadi pengurangan sebesar Rp. 773.750.000,50 menjadi sebesar Rp. 11.293.651.550,50 perubahan anggaran tersebut juga berdampak pada perubahan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung. Anggaran belanja langsung mengalami pengurangan sebesar Rp.773.749.693,50 menjadi Rp. 4.863.260.857,50, anggaran belanja langsung tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan pada belanja tidak langsung tidak mengalami perubahan dan tetap berjumlah Rp. 6.430.391.000, anggaran belanja tidak langsung tersebut digunakan untuk belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Terkait dengan adanya perubahan dan efisiensi anggaran belanja yang terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam apakah terdapat perubahan yang signifikan terhadap kinerja anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh perubahan anggaran yang terjadi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 di Masa Covid-19”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 di Masa *Covid-19*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 di Masa *Covid-19*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Publik, khususnya bagi konsentrasi Keuangan Negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan untuk perbaikan di masa mendatang guna meningkatkan kinerja anggaran belanja agar dapat lebih baik lagi kedepannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penelitian dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- I Palimbongan, R. R., Ekonomi dan Bisnis, F., & Manajemen Universitas Sam Ratulangi, J. (2019). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Performance Analysis of the Shopping Budget in the Tomohon City Financial and Income Management Agency*. 7(4), 4888–4897.
- Lantowa, F. D., & Machmud, J. (2020). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal (BPM-PDT) Provinsi Gorontalo*. 9(1), 33–43. ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/
- Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
- Mahsun. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mahsun, Firma Sulistiyowati dan Heribertus Andre Purwanugraha. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Novarian, Iwan dan Ardeno Kurniawan. 2020. *Audit Kinerja*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK. 02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

- Rahmah, Zuraida, & Abdulah, S. (2017). *Analisis Kinerja Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen*. 3(September), 213–222.
- Sinambela, E., & Pohan, kiki rizki ana. (2016). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. 16(1), 1–18.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko. 2016. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE
- Surat Penyedia Dana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Heri Kurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Suyitno, A. (2020). Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 67. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2446>
- Thoah, Miftah. 2018. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara